

## PENERAPAN MODEL PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM DINAMIKA PEMBANGUNAN DI DESA MEKARSARI KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN

MUNİYATI SULAM

### ABSTRAK

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan penerapan model pembangunan partisipatif dalam dinamika pembangunan desa, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembangunan partisipatif dalam dinamika pembangunan di Desa, hambatan dan upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data primer yaitu 9 orang yang diwawancarai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data hasil observasi dan wawancara, menginterpretasi data hasil observasi dan wawancara, mendeskripsikan data hasil observasi dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menarik kesimpulan data hasil observasi dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan model pembangunan partisipatif dalam dinamika pembangunan di Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan namun hasilnya belum optimal. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil wawancara dengan pemerintah desa dan masyarakat sebagian besar mengatakan sudah baik dan sebagian lagi mengatakan masih kurang. Hambatan yang dihadapi perangkat desa yaitu kehadiran masyarakat dalam kegiatan penyuluhan yang masih sedikit, interaksi pemerintah desa dengan masyarakat masih rendah, kurangnya sarana yang memadai serta kurang tegasnya sikap perangkat desa dalam memberikan sanksi. Upaya yang dilakukan yaitu pelatihan yang melibatkan masyarakat supaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembangunan partisipatif, lebih banyak mengadakan musyawarah dan diskusi tentang pembangunan partisipatif, menambah sarana yang ada serta meningkatkan sikap tegas dari perangkat desa.*

**Kata Kunci :** *Pembangunan Partisipatif, Pembangunan Desa.*

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan diidentikan sebagai perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, serta pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, yaitu pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi pada aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada awal level makro (nasional) dan mikro (wilayah) makna terpenting dari pembangunan yaitu adanya kemajuan atau perbaikan, pertumbuhan dan diverifikasi. Permasalahan yang masih belum dapat terpecahkan adalah belum optimalnya dimanfaatkan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan sehingga kebanyakan perencanaan yang disusun bersifat “*Top-down planning*”.

Memperhatikan permasalahan yang dihadapi perencanaan pembangunan, maka sasaran utama perencanaan pembangunan yang ingin dicapai pemerintah dengan diterapkannya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) secara menyeluruh di Indonesia, mencakup lima hal pokok yaitu.

1. Meningkatkan koordinasi antar pelaku pembangunan sehingga hasil yang diharapkan menjadi lebih optimal;

2. Meningkatkan keterpaduan dan sinergitas perencanaan antar pusat dan daerah yang terkait;

3. Meningkatkan keterpaduan antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

4. Mengoptimalkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan;

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. (sjafrizal, 2014:89).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dikemukakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Pembangunan partisipatif diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa pembangunan daerah sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Sejak dikenalnya model perencanaan partisipatif, istilah “*Stakeholders*” menjadi sangat meluas dan akhirnya dianggap sebagai keistimewaan model ini. Perencanaan partisipatif berawal dari keyakinan bahwa keberhasilan program-program pembangunan

ditentukan oleh komitmen semua “*Stakeholders*” dan komitmen ini didapat sejauh mana mereka terlibat dalam proses perencanaan program tersebut.

Berdasarkan pengamatan dan observasi di lapangan yang ada di Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran terdapat permasalahan diantaranya:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan partisipatif di Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.
2. Masih adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam partisipatif masyarakat di setiap Dusun di Desa Mekarsari kecamatan Cimerak terhadap pembangunan.
3. Masih adanya masyarakat yang merasa pembangunan di desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran belum efektif dan merata.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan model Pembangunan partisipatif dalam dinamika pembangunan di Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran?
2. Hambatan-Hambatan apa yang dihadapi untuk penerapan pembangunan partisipatif

dalam dinamika pembangunan di Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran?

3. Upaya-upaya apa yang dilakukan desa untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan model pembangunan partisipatif dalam dinamika pembangunan di Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran?

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penerapan model pembangunan partisipatif dalam dinamika pembangunan di Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan-hambatan apa yang dihadapi untuk penerapan pembangunan partisipatif dalam dinamika pembangunan di Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya-upaya apa yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan

model pembangunan partisipatif dalam dinamika pembangunan di Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.

- a. Menentukan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah
- b. Memilih populasi
- c. Memutuskan pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat
- d. Mengumpulkan data
- e. Mengatur dan menganalisis data

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya.

### **2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli 2018.

### **3. Subjek Penelitian**

Pemerintah, meliputi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mekarsari, Kepala Desa Mekarsari, Perangkat Desa dan Masyarakat. Dalam penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* yaitu informan yang diwawancarai dalam penelitian adalah orang – orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai topik penelitian sehingga dapat memberikan informasi selengkap – lengkapnya.

### **4. Prosedur**

Prosedur penelitian ini menggunakan prosedur penelitian deskriptif yaitu :

### **5. Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian ini data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung yaitu melalui wawancara mendalam yang dilakukan peneliti kepada narasumber dan observasi di lapangan. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pelengkap atau penunjang dan berasal dari sumber-sumber seperti buku, literatur, dokumen, *website* internet, skripsi, dan jurnal. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen-dokumen.

### **6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data interaktif. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014 : 31-34) tahap model analisis data interaktif ada tiga komponen, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan dalam interaksi-interaksi pada ketiga komponen.

## B. KAJIAN TEORI

Menurut Alexander (Anggara dan Sumantri, 2016:18), pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan

Menurut Adisasmita (2013:81) mengemukakan bahwa ada empat tahapan dari pembangunan partisipatif yaitu pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subyek atas program pembangunan yang diperuntukan bagi kepentingan mereka sendiri. sebagai berikut:

1. Sosialisasi;
2. Pendampingan;
3. Penguatan kelembagaan; dan
4. Implementasi Program/proyek pembangunan.

Menurut Wicaksono dan Sugiarto (Hadiwijoyo 2012:18) Perencanaan partisipatif sebagai berikut:

Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Tujuan dan cara harus dipandang sebagai suatu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan akan berpihak kepada rakyat.

Menurut Adisasmita prinsip-prinsip pembangunan, sarana pembangunan dan ruang lingkup pengembangan (2006:18-20) :

1. Pembangunan pedesaan seharusnya merupakan prinsip transparansi (keterbukaan),

partisipatif dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas), dan keterlanjutan (sustainable).

2. Sarana pembangunan pedesaan, yaitu untuk peningkatkan produksi dan produktifitas, percepatan pertumbuhan Desa, peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif, peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan serta penguatan kelembagaan.
3. Pengembangan pedesaan yang mempunyai ruang lingkup pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan pemukiman dan lainnya), pemberdayaan masyarakat, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan miskin) dan penataan keterkaitan antara kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan (*interruralurban relationship*).

Menurut Ericson (Santoso 2016:312) bentuk partisipasi dalam masyarakat pembangunan dibagi tiga tahap, yaitu:

1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea pllaning stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan;
2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*Implementation stage*). Partisipasi dalam tahapan ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut;
3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (*Utilitazion stage*). Partisipasi pada tahapan ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek, setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk menoprasikan

dan memelihara proyek setelah dibangun.

Berdasarkan ketentuan diatas maka jelas bahwa pembangunan partisipatif menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan. Pembangunan Partisipatif supaya elemen masyarakat secara bersama sama dapat berpartisipasi guna memenuhi kebutuhan, mulai dari tahap perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pemanfaatan guna memenuhi kebutuhannya.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Adisasmita (2013: 81) ada empat tahapan dari kegiatan pembangunan partisipatif yang harus dilakukan meliputi:

1. Sosialisasi;
2. Pendampingan;
3. Penguatan kelembagaan; dan
4. Implementasi Program/proyek pembangunan.

Berikut hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan model pembangunan partisipatif dalam dinamika pembangunan di Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran:

#### a. Sosialisasi

Dari hasil penelitian dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan-hambatan yaitu dalam penyuluhan terhadap masyarakat tentang pembangunan partisipatif seperti sedikit masyarakat yang hadir dalam penyuluhan. Dan adanya

pengarahan terhadap masyarakat akan pentingnya pembangunan partisipatif hambatan yang dihadapi kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa dalam mengadakan pengarahan terhadap masyarakat akan pentingnya pembangunan partisipatif.

Berdasarkan uraian diatas bahwa dalam penerapan model pembangunan partisipatif hendaknya selalu memberi tahu kepada masyarakat pembangunan apa saja yang menjadi target pemerintah desa dan adanya arahan-arahan tentang pembangunan partisipatif, supaya masyarakat antusias dalam pembangunan partisipatif dan pembangunan beres sesuai dengan waktu yang telah di targetkan.

#### **b. Pendampingan**

Dari hasil penelitian pendampingan dengan motivasi terhadap masyarakat oleh pemerintah desa untuk mengembangkan potensinya sudah dilaksanakan, namun belum optimal karena, masih ada masyarakat yang tidak mengikuti acara kegiatan dari pemerintah desa. Dalam memfasilitasi untuk pembangunan partisipatif diketahui bahwa sudah dilaksanakan, namun belum optimal karena, alat-alat untuk memfasilitasi pembuatan pembangunan belum lengkap.

Berdasarkan uraian diatas pendampingan pembangunan desa mekarsari harus dilakukan dengan perubahan-perubahan yang sistematis dengan melibatkan masyarakat melalui pengorganisasian dan meningkatkan

kemampuan sumberdaya masyarakat desa mekarsari dengan cara pemerintah desa harus mampu memotivasi masyarakat supaya ikut andil dalam pembangunan sengan memfasilitasi dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti pembuatan masjid, merenovasi jalan yang rusak.

#### **c. Penguatan Kelembagaan**

Dari hasil penelitian penguatan kelembagaan dengan menumbuhkan kekuatan mitra kerjasama sebagai pelaksana dalam menjalankan pembangunan diketahui bahwa sudah dilaksanakan, namun belum optimal karena, karena masih banyak masyarakat yang kurang antusias dengan program pemerintah. Sedangkan dalam menciptakan peraturan yang mendukung kegiatan pembangunan partisipatif diketahui bahwa masih belum dilaksanakan, hal ini terlihat dari belum adanya peraturan desa tentang pembangunan partisipatif.

Berdasarkan uraian diatas penguatan kelembagaan dilakukan dengan konsep-konsep perwujudan dari semua unsur masyarakat dengan mempunyai sumber daya manusia yang handal dan ahli yang mempunyai jaringan kemitraan yang luas dengan adanya peraturan-peraturan yang tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

#### **8. Implementasi Program/proyek pembangunan**

Dari hasil penelitian implementasi program, dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat sudah dilaksanakan, namun belum

optimal karena, pemerintah desa masih milih-milih dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Sedangkan dalam pengembangan kemampuan organisasi masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan pembangunan partisipatif diketahui bahwa sudah dilaksanakan, namun belum optimal karena, pemerintah masih bergantung pada swadaya masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas implementasi proyek partisipasi masyarakat merupakan potensi kekuatan dan peluang bagi pembangunan dan masyarakat harus ikut andil dalam pembangunan agar tercapainya pembangunan partisipatif yang efektif, positif, produktif dan dinamis.

#### **D. KESIMPULAN**

Penerapan model pembangunan partisipatif dalam dinamika pembangunan di Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangdaran pada umumnya telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa yang belum sesuai Cimerak kabupaten Pangdaran. pelaksanaannya. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya jalan;jalan yang rusak, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih kurang, salahsatunya banyak masyarakat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada ikut serta dalam kegiatan pembangunan. Berdasrkan metode tahapan pembangunan partisipatif yang dikemukakan oleh Adisasmita (2013:81), yang belum

dilaksanakan bisa dilihat dari masyarakat ikutserta dalam pembangunan jalan,; ikut berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah desa sehingga terjalin komunikasi dua arah antara pemerintah desa dengan masyarakat. Dengan ikut serta dalam musyawarah desa, pemerintah memahami apa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakatnya. Sedangkan satu indikator yang belum dilaksanakan adalah belum adanya perdes yang mengatur pembangunan partisipatif di Desa Mekarsari Kecamatan.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdoellah S. Oekan. 2016. *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- AnggaraSahya dan Sumantri. 2016. *Administrasi Pembangunan*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Brahmantya Henry. 2018. *Membangun Pariwisata dari Bawah*. Gadjah Mada University press
- Elfindri, 2008. *Strategi Sukses Membangun Daerah*. Gorga Media
- Hadiwijoyo Sakti Suryo. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Ruko Jambusari No. 7 . GRAHA ILMU

Mardikamto, Totok dan Soebiato,  
Poerwoko. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Alfabeta,cv.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri  
No.114 Tahun 2014 tentang  
Pedoman

Murdiyatomoko Janu. 2007. *Sosiologi*.  
Bandung : Grafindo media  
Pratama

Satori, Djam'an dan Komariah, Aan.  
2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta,cv.

Saefulhakim Sunsun. 2011.  
*Perencanaan dan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : Yayasan  
Pustaka Obor Indonesia.

Silalahi,Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung :PT Refika  
Aditama

Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta : PT  
RajaGrafindo Persada

### **Dokumen**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun  
2004 Tentang Sistem  
Perencanaan Pembangunan  
Nasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
Tentang Desa

Tentang Perubahan Kedua atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 06  
Tahun 2014.